KLIPING PERPUSTAKAAN DPR-RI
http://kliping.dpr.go.id

Judul : Susahnya produksi AC, impor evaporator pun jadi masalah
Tanggal : Minggu, 31 Juli 2022
Surat Kabar : Rakyat Merdeka
Halaman : 7

Susahnya Produksi AC
Impor Evaporator Pun Jadi Masalah



Darmadi Durianto

ANGGOTA Komisi VI DPR Darmadi Durianto menyoroti penyelidikan lonjakan impor produk evaporator. Langkah Komite Pengamanan Perdagangan Indonesia (KPPI) ini dinilai mencerminkan adanya inkonsistensi regulasi.

Adapun regulasi yang dimaksud, yakni Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 25 tahun 2022 tentang kebijakan dan pengaturan impor. Di mana salah satu produk yang dibatasi adalah produk pendingin ruangan atau *Air Conditioner* (AC). KPPI sendiri berada di bawah Kementerian Perdagangan (Kemendag).

"Seharusnya Kementerian Perdagangan (Kemendag) membuat kebijakan yang konsisten dan tidak menyulitkan pelaku usaha," kata Darmadi di Jakarta, kemarin.

Dijelaskan Darmadi, dalam Permendag ini jelas mengatur pembatasan impor pendingin ruangan. Pelaku usaha yang ingin melakukan impor AC secara utuh (CBU) harus lebih dahulu mengajukan persetujuan impor ke pemerintah.

Para pelaku usaha sejauh ini patuh dengan Permendag tersebut. Mereka tidak melakukan impor AC secara utuh melainkan melakukan produksi di dalam negeri. Sayangnya, beberapa bahan baku produksi AC tidak bisa dipasok dari dalam negeri sehingga terpaksa harus impor, salah satunya evaporator.

"Tetapi yang terjadi malah pelaku usaha dilaporkan dan diselidiki oleh KPPI Kemendag," sesal politikus Fraksi PDI Perjuangan ini.

Darmadi heran, ada kebijakan yang dalam praktiknya tidak sinkron dengan implementasi di bawah. Kemendag justru menyulitkan pelaku usaha industri dalam negeri yang ingin melakukan produksi di dalam negeri. "Tetapi malah disclidiki karena impor bahan baku produksi evaporator," ujarnya.

Seharusnya, sambung dia, Kemendag duduk bersama dengan semua pemangku kepentingan industri dalam negeri dari hulu ke hilir. Tujuannya agar bisa mengetahui kesiapan industri komponen pendukung produksi AC sebelum membuat suatu kebijakan. "Dengan demikian, kebijakan yang diambil dapat tepat sasaran," tegasnya. ■ KAC